

PENGARUH INFLASI DAN PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

Ayunita Kristin¹
Ida Bagus Darsana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
¹email: ayunitamey51@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali periode tahun 2009-2018. Penelitian dilakukan di Provinsi Bali dengan menggunakan observasi. Pengumpulan data berupa data tingkat inflasi, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan periode tahun 2009-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan inflasi dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Provinsi Bali periode tahun 2009-2018. Inflasi, pendidikan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Bali periode tahun 2009-2018. Pengangguran memediasi pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali periode tahun 2009-2018.

Kata kunci : Inflasi, Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan.

ABSTRACT

The development is carried out by the community to create prosperity to overcome poverty levels and organize a decent life for all the people who will ultimately realize the welfare of the population. The purpose of this study was to analyze the effect of inflation and education on unemployment and poverty in Bali Province in the period 2009-2018. The study was conducted in the Province of Bali using the method of library (library research). Data collection techniques with direct recording in the form of data rates of inflation, education, unemployment and poverty for the period 2009-2018. The analysis technique used in this study is path analysis. The results showed inflation and education had a negative effect on unemployment in Bali Province in the 2009-2018 period. Inflation, education and unemployment have a positive effect on poverty in Bali Province in the 2009-2018 period. Unemployment mediates the effect of inflation and education on poverty in Bali Province in the 2009-2018 period.

Keywords: *Inflation, Education, Unemployment, Poverty.*

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat utama bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting diketahui untuk menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi dapat meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap masyarakat miskin (Edyson *et al.*, 2017).

Meningkatkan kegiatan perekonomian bertujuan untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah merupakan tujuan dari pembangunan nasional (Agus dan Sudarsana, 2017). Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu

mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu (Wirawan dan Sudarsana, 2015).

Sampai akhir tahun 1960-an, sebagian besar ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto) setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk (Anggit dan Fitri, 2012). Dengan cara tersebut angka pendapatan perkapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan kepada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mereka berargumen bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi melalui *trickle-down effect* (efek tetesan ke bawah). Tetesan kemakmuran inilah yang diyakini memecahkan permasalahan kemiskinan (Fahma, 2015).

Permasalahan strategis di Pemerintahan Provinsi Bali tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (Problem Nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain seperti Pulau Jawa. Provinsi Bali merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, membuat Provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia (30 Provinsi). Dalam perbandingan rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2013-2017, pada tahun 2017 Provinsi Bali memiliki rata-rata

kemiskinan 4,25 persen naik 0,10 persen dari tahun 2016. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Gamal *et al.* 2016).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997). Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak berharta, berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak, seperti sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan air bersih, dan sanitasi (Nugroho, 2015). Kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengangguran, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, konsumsi, lokasi, dan lingkungan (Eka, 2017). Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural (Dian dan Marhaeni, 2012).

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat pengangguran. Jundi (2014) menyebutkan bahwa pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang

cepat. Istiara(2017) menyatakan tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Nugroho (2015), menyebutkan bahwa variabel pengangguran menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, menurutnya efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karenamenganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Yuni dan Sudibia, 2015).

Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempegaruhi tingkat kemiskinan. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang yang berlangsung secara terus menerus dalam satu periode tertentu (Lucy et al., 2017). Menurut Sukirno (2007:317) pengertian inflasi merupakan peristiwa di mana terjadi kenaikan harga umum secara terus menerus. Peristiwa ini pada akhirnya menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perekonomian. Salah satu dampak utama yang ditimbulkan adanya inflasi yaitu masalah pengangguran (Mahmoud, 2013). Jika kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer (sekalipun dalam persentase yang besar) tetapi, kenaikan satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi jika kenaikan tersebut berdampak meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain merupakan inflasi (Mehrnoosh and Feizolah, 2016). Masalah inflasi adalah masalah yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah. Adapun yang

menjadi tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah sehingga mampu menekan angka kemiskinan (Sukirno, 2007:112).

Pentingnya masalah kemiskinan mengharuskan pemerintah Provinsi Bali memiliki upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin (Aurangzeb, 2013). Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yarlina, 2012).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Menurut BPS dan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Menurut Dian dan Marhaeni(2015) menyatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia. Haifaet *al.* (2016) menyatakan pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, maka

pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (*human capital*) (Emirgena, 2014). Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dengan tingkat yang semakin tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Purnami dan Saskara (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Rendahnya tingkat pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya.

Sumitro(2007:112) menyatakan hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Sukirno, 2007:34), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan (Torruamet *al.*, 2014). Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangun ekonomi dalam jangka panjang (Patera dan Suardana, 2015).

Teori lingkaran setan (*Vicius Sircle of Poverty*) menurut Nurkse yaitu konsep yang mengandaikan suatu konstellasi melingkar dari daya- daya yang cenderung beraksi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menempatkan

suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dinegara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Bertolak dari teori inilah, pemerintah belajar cara pandang atau paradigma untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah ekonomi di Provinsi Bali. Pada pokoknya teori itu mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Yofa dan Aswitari (2016) menyaakan untuk bisa membangun, maka lingkaran setan itu harus diputus, dari sisi *supply* yaitu dengan meningkatkan pendidikan sehingga meningkatkan produktifitas yang rendah untuk mendapatkan penghasilan yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, kualitas pendidikan, dan akses yang sama terhadap pendidikan mendapat peran penting dalam pengentasan kemiskinan (Arsyad, 1997:98). Memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi *demand* dengan menekan terjadinya inflasi, hal ini akan berdampak kepada permintaan dengan demikian produktifitas dapat meningkat untuk mengatasi kemiskinan.

Provinsi Bali merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, membuat Provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Berikut disajikan data mengenai inflasi, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan dari tahun 2009-2018 pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 menunjukkan data mengenai inflasi, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan dari tahun 2009-2018. Tingkat kemiskinan tertinggi yang disebabkan oleh kondisi sebagian besar di Provinsi Baliterjadinya ketimpangan pendapatan rumah tangga mengalami peningkatan di daerah perkotaan dibanding di pedesaan. Minimnya pendidikan dan lapangan pekerjaan yang kurang merata di Provinsi Bali menjadi masalah yang sudah berlarut-larut yang di alami pemerintah. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu. Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah di Provinsi Bali.

Tabel 1 Data Inflasi, Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2009-2018

No.	Tahun	Inflasi (%)	Tingkat Pendidikan (Rata-rata lama sekolah) (Tahun)	Pengangguran (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2009	4,37	14,1	3,30	4.88
2	2010	8.1	15,1	3,13	5.67
3	2011	3.75	14,7	3,06	4.59
4	2012	4.71	14,9	2,95	3.85
5	2013	7.35	15,4	2,10	4.49
6	2014	8.03	15,2	1,83	4.76
7	2015	2.7	15,7	1,90	4.74
8	2016	2.94	16,1	1,99	4.25
9	2017	3.31	15,9	1,48	4.25
10	2018	3.4	15,9	1,37	4.01

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019

Masih tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa penanganan yang dilaksanakan pemerintah untuk masyarakat miskin belum mampu untuk menjangkaunya. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai

diberlakukan sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan, sehingga untuk menanggulangi kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya di Provinsi Bali.

Penelitian ini dilakukan mengingat Provinsi Bali yang sudah di kenal sebagai ikon pariwisata juga belum lepas dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Keterkaitan antara pendidikan dan pengangguran akan dilihat melalui pendekatan dengan melihat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan dikaitkan dengan keadaan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Masih banyak masyarakat di Provinsi Bali belum mampu memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan primer yaitu pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Agus dan Sudarsana, 2017). Berbagai upaya pro rakyat kecil dilakukan untuk menjadikan masyarakat menjadi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,

salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi tahunan (Wirawan dan Arka, 2015). Menekan inflasi dan meningkatkan pendidikan merupakan cara yang ampuh untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah, menekan inflasi dan meningkatkan pendidikan akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin.

Agus dan Sudarsana (2017) menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan masyarakat sedangkan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat. Yarlina (2012) menyatakan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Nugroho (2015) menyatakan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat, dan pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Edysonet *al.* (2017) menyatakan inflasi dan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat.

Obi, Zita and Obi, Cyril (2014) menyatakan pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan tenaga kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*) yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak kondisi pertumbuhan ekonomi dimana tingkat kemiskinan yang tinggi. (Tambunan, 2009 : 32) Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004 : 287) dalam Hermanus (2012 : 46) Hukum Okun menyatakan bahwa apabila terjadi penurunan PDB 2 persen PDB secara relatif terhadap PDB potensial maka akan terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar satu persen.

Menurut Mankiw (2007 : 251) dalam Hermanus (2012 : 47) penurunan pada produksi barang dan jasa yang terjadi selama masa resesi selalu berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran.

Inflasi dan kemiskinan dalam penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan, dengan menggunakan dua jenis data yaitu data yang dipublikasikan oleh BPS dan data yang diolah oleh LPEM UI. Secara lebih spesifik, inflasi memperlihatkan pengaruh yang cenderung tidak konsisten dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah. Jika menggunakan data BPS terlihat bahwa inflasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan, tetapi bila menggunakan data alternatif terdapat kecenderungan inflasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan. Secara implisit juga memperlihatkan kompleksnya masalah kemiskinan masyarakat di Provinsi Bali.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*Sustainable Development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya sehingga mampu menekan angka pengangguran di masyarakat (Peteret *al.*, 2016). Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik untuk mengatasi pengangguran di masyarakat.

Pendidikan berperan penting dalam kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam

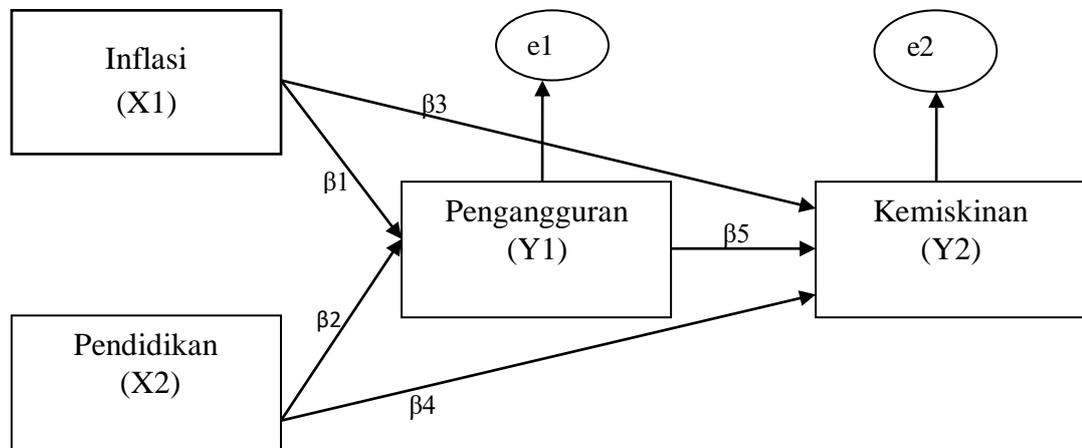
pemahaman akan perekonomian, memperluas produktivitas, dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen atau warganegara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai kolerasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang sehingga mampu mengatasi kemiskinan. Karena tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya tahun memperoleh pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan yang besar tersebut akan semakin besar (Gaiha, 1993 : 76).

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh inflasi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, dan (3) menganalisis peranan pengangguran dalam memediasi pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:68). Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 9 Kabupaten/Kota Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Denpasar dengan menggunakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel inflasi, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data inflasi, tingkat pendidikan, jumlah

pengangguran dan tingkat kemiskinan di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode yaitu mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS, dan buku-buku literature. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*).



Gambar 1 Model Analisis Jalur (*path analysis*) Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali

Gambar 1 menunjukkan terdapat dua hubungan substruktural. Substruktural pertama menyatakan hubungan kausal dari X₁, X₂ ke Y₁. Substruktural kedua menyatakan hubungan kausal dari X₁, X₂, Y₁ ke Y₂.

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:
 Y₁ = Pengangguran
 Y₂ = Kemiskinan
 X₁ = Inflasi

X_2 = Pendidikan
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel
 e_1, e_2 = *error*

Anak panah e_1 menuju pengangguran (Y_1) menunjukkan jumlah varians pengangguran yang tidak dijelaskan oleh inflasi (X_1), pendidikan (X_2). Nilai kekeliruan taksiran standar, yaitu:

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2} \dots \dots \dots (3)$$

Anak panah e_2 menuju kemiskinan (Y_2) menunjukkan jumlah varians kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh inflasi (X_1), pendidikan (X_2) pengangguran (Y_1). Nilai kekeliruan taksiran standar yaitu:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2} \dots \dots \dots (4)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - e_1^2 - e_2^2 \dots \dots \dots e_p^2 \dots \dots \dots (6)$$

Dalam hal ini, intepretasi terhadap $R^2 m$ sama dengan intepretasi koefisien determinasi R^2 pada analisis regresi.

Langkah ketiga yaitu perhitungan koefisien jalur menggunakan *software SPSS versi 24.0* melalui analisis regresi yang distandardisasi (*standardized coefficients beta*) untuk pengaruh langsungnya, sedangkan pengaruh tidak langsungnya merupakan perkalian antara koefisien jalur yang dilalui setiap persamaan dan pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung.

Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan intepretasi hasil analisis. Cara melakukan intepretasi model adalah mengintepretasikan hasil atau nilai parameter yang ada. Koefisien yang tidak signifikan nilainya dianggap tidak

ada, sedangkan nilai parameter yang signifikan bisa dilihat berapa yang mempunyai pengaruh langsung dan seberapa besar yang berpengaruh tidak langsung.

Uji Sobel atau sering disebut dengan uji pengaruh tidak langsung merupakan cara untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (X_1) terhadap variabel terikat (Y_2) melalui variabel intervening (Y_1).

Menentukan standar error pengaruh tidak langsung.

Pengaruh tidak langsung X_1 melalui Y_1 terhadap Y_2 .

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

Pengaruh tidak langsung X_2 melalui Y_1 terhadap Y_2 .

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

Menghitung nilai t-hitung.

Koefisien $\beta_1\beta_5$

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

Koefisien $\beta_2\beta_5$

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

Keterangan :

β_1 = Koefisien regresi pengaruh variabel X_1 terhadap Y_1

β_2 = Koefisien regresi pengaruh variabel X_2 terhadap Y_1

β_5 = Koefisien regresi pengaruh variabel Y_1 terhadap Y_2

S_{β_1} = Standar error koefisien regresi variabel X_1 terhadap Y_1

S_{β_2} = Standar error koefisien regresi variabel X_2 terhadap Y_1

S_{β_5} = Standar error koefisien regresi variabel Y_1 terhadap Y_2

Kriteria pengujian:

Jika z hitung $\leq z$ tabel (1,96) maka H_0 diterima, yang berarti pengangguran (Y_1) bukan merupakan variabel intervening. Jika z hitung $> z$ tabel (1,96) maka H_0 ditolak, yang berarti pengangguran (Y_1) merupakan variabel intervening.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah atau Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Bali memiliki luas wilayah yang secara keseluruhan sebesar 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Luas wilayah per kabupaten/kota, maka Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² atau 24,25 persen dari luas Provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,94 persen), Tabanan seluas 839,3 km² (14,90 persen) dan Karangasem seluas 839,54 km² (14,90 persen), sedangkan sisanya adalah masing-masing Badung 418,52 km², Kota Denpasar 127,78 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km² dan Bangli 520,81 km² dengan total luas wilayah sekitar 31,01 persen dari luas provinsi. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, yang meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota provinsi. Selain Pulau Bali, Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng.

Struktur perekonomian Bali mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. Pilar-pilar ekonomi dibangun lewat keunggulan komparatif pada sektor pariwisata sebagai *leading sectornya*. Kondisi ini disebabkan karena sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata (kelompok sektor tersier), sangat banyak yang selanjutnya secara bersama-sama melalui efek multiplier, efek penyebaran dan juga efek penetesan ke bawah (*trickle down effect*) menumbuhkan perekonomian di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali menurut hasil sensus penduduk tahun 2017 mencapai angka rata-rata 1,87 persen per tahun dari tahun 2012, angka ini melebihi dari laju pertumbuhan penduduk secara nasional, yang hanya 1,49 persen dalam kurun waktu yang sama. Pertambahan penduduk itu berasal dari kelahiran alamiah dan dari perpindahan penduduk dari luar Bali, dengan rincian yang disebabkan oleh kelahiran alamiah sebesar 0,96persen dan yang diakibatkan oleh migrasi sosial sebesar 0,91 persen. Angka ini memiliki arti bahwa kontribusi pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi sosial hampir seimbang dengan kelahiran alamiah. Banyaknya pendatang (migrasi) dari berbagai daerah yang mencoba mengadu nasib di Bali, karena Bali sebagai daerah pariwisata ini dinilai menjanjikan peluang dan harapan dalam meningkatkan kesejahteraan dan peluang kesempatan kerja. Penentuan sampel dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2 Seleksi Penentuan Sampel

No	Variabel	Jumlah Sampel
1	Inflasi	10
2	Pendidikan	10

3	Pengangguran	10
4	Kemiskinan	10
Total Sampel		40

Sumber: Data sekunder (diolah), 2019

Uraian mengenai jumlah sampel berdasarkan tahun pengamatan dari setiap Kabupaten di Provinsi Bali menjelaskan yang dijadikan sebagai sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan data sekunder (observasi non partisipan). Terdapat data *outlier* pada sampel yang disebabkan karena data memiliki karakteristik unik yang muncul dalam bentuk nilai periode 2009-2018.

1) Menguji Pengaruh Variabel Inflasi (X_1) dan Pendidikan (X_2) terhadap Pengangguran (Y_1)

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel bebas (inflasi dan pendidikan/ X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (pengangguran/ Y_1).

Tabel 3 Hasil Analisis Jalur Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>			
	B	Beta	T	Sig.
(Constant)	17,025		4,537	0,003
Inflasi	-0,002	-0,006	-0,031	0,976
Pendidikan	-0,962	-0,847	-4,046	0,005
R^2	: 0,714	F Statistik	: 8,750	Sig.F : 0,012

Sumber: Data sekunder (diolah), 2019

Berdasarkan laporan pada Tabel 3, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = -0,002 X_1 - 0,962 X_2$$

Melalui persamaan pada Tabel 3 Uji hipotesis pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dijelaskan bahwa pengaruh langsung dari variabel inflasi (X_1) terhadap variabel pengangguran memberikan hasil $-0,002$ dan nilai sig $0,976$ yang artinya variabel inflasi (X_1) berpengaruh negatif terhadap variabel pengangguran dengan nilai $b_1 = -0,002$. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel pendidikan (X_2) terhadap variabel pengangguran memberikan hasil $-0,962$ dan nilai sig $0,005$ yang artinya variabel pendidikan (X_2) berpengaruh negatif terhadap variabel pengangguran dengan nilai $b_2 = -0,962$.

Inflasi dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap variabel pengangguran, ini berarti sifat perkaitan diantara inflasi harga dan tingkat pengangguran tidak berbeda dengan sifat hubungan diantara inflasi upah dan tingkat pengangguran. Pada waktu pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relatif lambat, akan tetapi makin rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku. Hasil penelitian ini searah dengan pernyataan Gamal *et al.* (2015) menyatakan inflasi dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Jundi (2014) membuktikan dalam penelitiannya inflasi dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Dipertegas oleh Agus dan Sudarsana (2017) yang menyatakan bahwa variabel inflasi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

2) Menguji Pengaruh Variabel Inflasi (X_1) dan Pendidikan (X_2) terhadap Kemiskinan (Y_2)

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel bebas (inflasi dan pendidikan/ X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (kemiskinan/ Y_2).

Tabel 4 Hasil Analisis Jalur Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Beta		
(Constant)	-1,151		-0,318	0,761
Inflasi	0,133	0,586	3,853	0,008
Pendidikan	0,243	0,230	1,152	0,003
Pengangguran	0,590	0,882	3,211	0,018
R ²	: 0,871	F Statistik	: 13,461	Sig.F : 0,004

Sumber: Data sekunder (diolah), 2019

Berdasarkan laporan pada Tabel 4, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = 0,133 X_1 + 0,243 X_2$$

Melalui persamaan pada Tabel 4 Uji hipotesis pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap kemiskinan dijelaskan bahwa pengaruh langsung dari variabel inflasi (X_1) terhadap variabel kemiskinan memberikan hasil 0,133 dan nilai sig 0,008 yang artinya variabel inflasi (X_1) berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan dengan nilai $b_1 = 0,133$. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel pendidikan (X_2) terhadap variabel kemiskinan memberikan hasil 0,243 dan nilai sig 0,003 yang artinya variabel pendidikan (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan dengan nilai $b_2 = 0,243$.

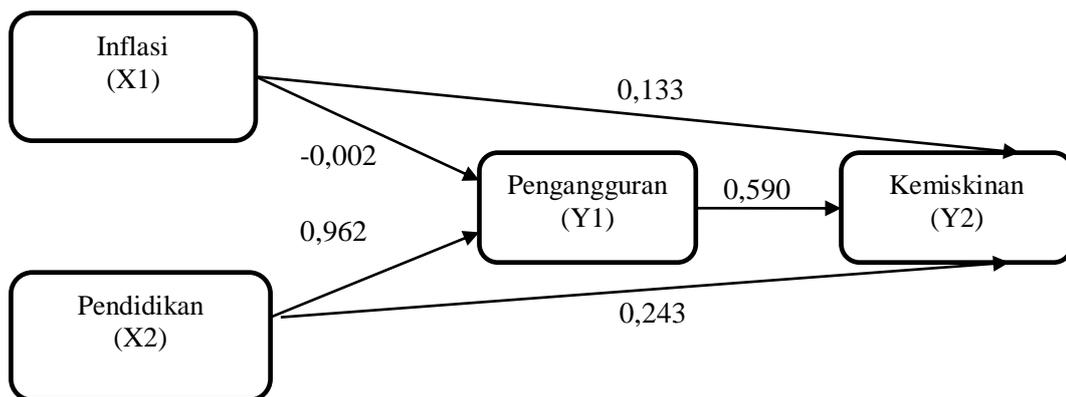
Inflasi, pendidikan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, hal ini mengandung arti Peteret *al.* (2016) menyatakan secara lebih spesifik, inflasi memperlihatkan pengaruh yang cenderung tidak konsisten dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah. Secara implisit juga memperlihatkan kompleksnya masalah kemiskinan masyarakat di Provinsi Bali. Upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*Sustainable*

Development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya sehingga mampu menekan angka pengangguran di masyarakat (Peteret *al.*, 2016).

Hasil ini searah dengan pernyataan Jundi (2014) membuktikan dalam penelitiannya inflasi, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dipertegas oleh Agus dan Sudarsana (2017) yang menyatakan bahwa variabel inflasi, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gamal *et al.* (2015) menyatakan inflasi, tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

3) Menguji Pengaruh Tidak Langsung Inflasi (X₁) dan Pendidikan (X₂) Terhadap Kemiskinan (Y₂) Melalui Pengangguran (Y₁) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Langkah pertama dalam analisis jalur mengetahui pengaruh yang signifikan secara tidak langsung variabel inflasi dan pendidikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Gambar 2. Model Diagram Jalur Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali

Gambar 2 digambarkan koefisien jalur pada model pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil analisis

seperti pada Gambar 2 terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2_m) = $1 - (P^2_{e1} \times P^2_{e2}) = 1 - (0,714^2 \times 0,871^2) = 0,615$. Nilai tersebut berarti sebesar 61,5 persen variasi dari variabel kemiskinan (Y_2) dipengaruhi oleh model yang dibentuk oleh variabel inflasi (X_1), pendidikan (X_2) dan pengangguran (Y_1), sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,5 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kemiskinan, hal ini menyatakan Menurut Sukirno (2007:127) pengangguran berdampak pada berkurangnya pendapatan dalam masyarakat, pengangguran yang ada dalam masyarakat menghambat pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal, dengan demikian menurunkan kemakmuran yang harusnya mampu dicapai. Hasil ini searah dengan pernyataan Mohammed *et al.* (2015) menyatakan pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Nugroho (2015) membuktikan dalam penelitiannya pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dipertegas oleh Wirawan dan Sudarsana (2015) yang menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Inflasi dan pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kemiskinan melalui pengangguran, hal ini menyatakan pengangguran yang ada dalam masyarakat menghambat pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal, dengan demikian menurunkan kemakmuran yang harusnya mampu dicapai, sehingga terciptanya kemiskinan masyarakat. Hasil ini searah dengan Nugroho (2015) menyatakan menyatakan inflasi dan pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Nugroho (2015) membuktikan

dalam penelitiannya inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dipertegas oleh Wirawan dan Sudarsana (2015) yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu, (1) lokasi penelitian ini hanya di Provinsi Bali yang terdapat di Bali dan hanya meneliti mengenai kesempatan kerja, sedangkan masih terdapat beberapa lokasi lainnya selain Bali, seperti Jakarta, Surabaya yang lebih luas daripada wilayah Bali, (2) penelitian hanya menggunakan teknik *path* analisa, sedangkan dapat dikembangkan lagi dengan teknik analisa yang lainnya, seperti: *MRA*, *SEM analisis*, dan *AMOS*, dan (3) penelitian melibatkan subyek yang terbatas, yakni 40, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang lebih besar.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka simpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- 1) Inflasi dan pendidikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2018.
- 2) Inflasi, pendidikan dan pengangguran berpengaruh positif secara langsung terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2018.
- 3) Pengangguran memediasi pengaruh inflasi dan pendidikan secara langsung terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2018.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah pusat maupun daerah di Provinsi Bali harus memperhatikan kenaikan inflasi yang terjadi, pengendalian inflasi wajib dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga peningkatan pendapatan yang diperolehnya menjadi lebih berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 2) Pemerintah seyogyanya memiliki sinergi antara pemerintahan kab./kota dan Provinsi serta pusat untuk penyusunan program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta biaya yang menyertainya. Agar kebijakan pengeluaran pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi juga dipertegas bahwa dalam pertumbuhan akan diciptakan peningkatan perluasan kesempatan kerja, mengingat masih kecilnya elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.
- 3) Kepada pemerintah disarankan guna mengatasi pengangguran, yang menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maka perlu pengembangansumber daya manusia dengan membukaberbagai lembaga pendidikanformal dan non formal, sehingga peluang sumber daya manusia lebihterbuka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.
- 4) Eratnya pengaruh inflasi, pendidikan dan pengangguran terhadap kejadian kemiskinan di Provinsi Bali seharusnya menjadi perhatian serius dalam

program pengentasan kemiskinan. Pihak-pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan harus memberi perhatian khusus terhadap masalah inflasi dan pengangguran. Perlu kerja banyak pihak agar masalah pengangguran dapat diatasi dengan membuka peluang kerja bagi para pengangguran maupun memberi peluang lebih besar kepada yang setengah menganggur.

REFERENSI

- Agus Adi Putra, I Komang., Sudarsana Arka. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Udayana*. 7(3): h: 416-444
- Anggit Yoga Permana, Fitri Arianti. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Diponegoro *Jurnal of Economic*. 1(1): h: 1-8
- Aurangzeb, Khola Asif. 2013. Factors Effecting Unemployment: A Cross Country Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 3(1): h: 219-230
- Dian Purnama Yanthi, Cokorda Istri., Marhaeni, A.A.I.N., 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. 11(2): h: 68-75
- Edyson Susanto, Eny Rochaida, Yana Ulfah, 2017. Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Jurnal Inovasi Ekonomi*. 13(1): h:19-27
- Eka Sulistiana Putri. 2017. Pengaruh inflasi, Pengangguran, dan Demokrasi terhadap Kemiskinan Indonesia Tahun 2009-2012. *Skripsi Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta*.
- Emirgena Nikoll. 2014. Economic growth and unemployment rate. Case of Albania. *European Journal of Social Sciences Education and Research*. 1(1): h: 217-227
- Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, Warsilan. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*. 12(1): h: 29-48
- Fahma Sari Fatma. 2015. Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*
- Haifa Mefteh, Mabrouka Bouhajib, Fakher Smaoui. 2016. Higher education, Graduate unemployment, Poverty and Economic growth in Tunisia, 1990-2013. *International Journal of Atlantic Review of Economics*. 1(4): h: 1-22
- Loyce V. Omari & Willy Muturi. 2016. The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya. *Global Journal of Human-Social Science: E Economics*. 16(2): h: 1-11

- Lucy Anning Ali Salman Tuama Samuel Darko. 2017. Inflation, Unemployment and Economic Growth: Evidence From The Var Mode Approach For The Economy of Iraq. *International Journal of Developing and Emerging Economies*. 5(1): h: 26-39
- Mahmoud Ali Jaradat. 2013. Impact of inflation and unemployment on Jordanian GDP. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. 4(10): h: 317-344
- Mehmood, Rashid; Sadiq, Sara. 2015. The relationship between government expenditure and poverty: A cointegration analysis. *Romanian Journal of Fiscal Policy*. 1(1): h: 29-37
- Mehrnoosh Mohsenia, Feizolah Jouzaryan. 2016. Examining the Effects of Inflation and Unemployment on Economic Growth in Iran (1996-2012). *Global Journal of Procedia Economics and Finance*. 3(6): h: 381 – 389
- Mohammed Yelwa, Okoroafor O.K.David, Awe, Emmanuel Omoniyi. 2015. Analysis of the Relationship between Inflation, Unemployment and Economic Growth in Nigeria: 1987-2012. *International Journal of Applied Economics and Finance*. 2(3): h: 102-109
- Muhammad Umair, Raza Ullah. 2013. Impact of GDP and Inflation on Unemployment Rate: A Study of Pakistan Economy in 2000-2010. *International Review of Management and Business Research*. 2(2): h: 388-400
- Muhammad Afzal, Muhammad Ehsan Malik, Ishrat Begum, Kafeel Sarwar, Hina Fatima. 2015. Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis. *International Journal of Elementary Education*. 22(1): h: 23-45
- Obi, Zita Chika1 and Obi, Cyril Ogugua. 2014. Impact of government expenditure on education: The Nigerian experience. *International Journal of Business and Finance Management Research*. 2(1): h: 42-48
- Patera, I Made, Suardana I Wayan, 2015. Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Piramida*. 11(2): h: 95-105
- Peter Siyan and Adewale E. Adegioriola and James Ademola Adolphus. 2016. Unemployment and Inflation: Implication on Poverty Level in Nigeria. *Journal of Procedia Economics and Finance*. 4(1): h: 1 – 23

- Purnami, Ni Made Sasih. Saskara, Ida Ayu Nyoman. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 5(11): h: 3-19
- Rubee Singh. 2018. Impact of GDP and Inflation on Unemployment Rate: "A Study of Indian Economy in 2011-2018. *International Journal of Management, IT & Engineering*. 8(3): h: 2249-0558
- Torruam, Japheth Terande, Abur, Cyprian Clement. 2014. The Relationship between Unemployment, Inflation and Crime: An Application of Cointegration and Causality Analysis in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*. 5(4): h: 131-138
- Wirawan, I Made Tony. Arka, Sudarsana. 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*.4(5): h: 32-51
- Yarlina Yacoub. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Sosial*. 8(3): h: 176-185
- Yofa Selvida Theresia Purba, Luh Putu Aswitari. 2016. Pengaruh Peran Sektor Non-Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Udayana*. 5 (7): h: 799-824
- Yuni Adipuryanti, Ni Luh Putu., Sudibia, I Ketut. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.*Jurnal Piramida*. 11(1): h: 20-28